

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian sosio-teologis terhadap pemikiran Robert N. Bellah serta refleksi kontekstual atas praksis Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Nusa Tenggara Timur, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan utama.

Konsep agama sipil (*civil religion*) menurut Bellah menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah sepenuhnya bebas dari dimensi religius. Agama sipil hadir sebagai bentuk religiusitas publik yang mengekspresikan nilai-nilai transenden melalui simbol, ritus, dan narasi kebangsaan tanpa terikat pada agama formal tertentu. Dalam kerangka Bellah, agama sipil memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana pembentuk solidaritas sosial dan legitimasi moral negara, sekaligus sebagai kekuatan profetis yang mampu mengkritik penyimpangan kekuasaan dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral.

Kajian ini menunjukkan bahwa agama sipil merupakan fenomena yang ambigu dan ambivalen. Di satu sisi, agama sipil berpotensi membangun kohesi sosial, memperkuat etos kebangsaan, dan menyediakan bahasa moral bersama dalam masyarakat yang plural. Namun di sisi lain, agama sipil juga mengandung resiko teologis dan etis, terutama ketika simbol-simbol religius disakralkan secara berlebihan dan digunakan untuk membenarkan kekuasaan politik, nasionalisme sempit, atau kepentingan ideologis tertentu. Dalam kondisi demikian, agama kehilangan daya kritisnya dan justru berfungsi sebagai instrumen legitimasi negara.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, fenomena yang menyerupai agama sipil tampak dalam praktik kehidupan bernegara dan beragama, seperti doa-doa kenegaraan, keterlibatan tokoh agama dalam agenda publik, serta penggunaan bahasa moral-religius dalam wacana sosial-politik. Kehadiran agama dalam ruang publik Indonesai menunjukkan bahwa sekularisasi tidak menghapus peran agama melainkan mengubah bentuk dan fungsinya dalam kehidupan bersama.

Sebagai gereja mayoritas di NTT, GMIT memiliki posisi strategis sebagai aktor moral publik, bukan sebagai agama negara. Keterlibatan GMIT dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta partisipasinya dalam ritus-ritus publik menunjukkan bahwa gereja beroperasi dalam ruang agama sipil. Namun, keterlibatan ini menuntut kewaspadaan teologis agar gereja tidak terjebak dalam sakralisasi negara atau kedekatan yang tidak kritis dengan kekuasaan. Kesetiaan iman Kristen menuntut gereja untuk selalu menempatkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala klaim ideologis dan politis.

Dan penelitian ini menegaskan pentingnya teologi publik yang kritis dan reflektif bagi gereja. Melalui teologi publik, gereja dipanggil untuk hadir dalam ruang publik sebagai suara profetis yang menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih, tanpa kehilangan identitas iman dan integritas teologisnya. Dengan demikian, gereja dapat berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.

USUL-SARAN

1. GEREJA

Bagi GMIT, diperlukan pengembangan kesadaran teologis yang lebih mendalam mengenai peran gereja dalam ruang publik. GMIT perlu terus menegaskan posisinya sebagai aktor moral publik yang kritis, bukan sebagai legitimasi simbolik bagi kekuasaan negara. Pendidikan teologi jemaat dan pelayan gereja perlu diarahkan agar mampu membaca dinamika agama sipil secara kritis dan profetis

Bagi para pelayan dan pimpinan gereja, keterlibatan dalam agenda kenegaraan dan sosial hendaknya selalu disertai dengan sikap reflektif dan keberanian profetis. Kedekatan dengan negara harus diimbangi dengan kemampuan menjaga sarak kritis, sehingga gereja tetap mampu menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran martabat manusia.

2. LEMBAGA FAKULTAS TEOLOGI

Bagi lembaga akademik teologi, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kajian lanjutan mengenai agama sipil, teologi publik, dan relasi antara gereja dan negara dalam konteks Nusa Tenggara Timur.